

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN PONOROGO  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN  
PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR**

Dita Anggraini  
NPP. 30.0790

*Asdaf Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [ditaanggraini1717@gmail.com](mailto:ditaanggraini1717@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** People's political participation is an important system in a country. People's political awareness in terms of giving their right to vote in the implementation of regional elections is mandatory because it concerns the future of a region in the next five years. The results of the recapitulation of votes in the 2020 Ponorogo Regency regional election showed a decrease in votes by 1.56% compared to the 2015 Ponorogo Regency election. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the factors that influence community political participation in the 2020 Ponorogo Regency regional election using the Surbakti theory (2010) so that factors that cause a decrease in community political participation in the 2020 Ponorogo Regency regional election are obtained. **Method:** This study used descriptive qualitative research methods, with data collection techniques through interviews and documentation. With data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results:** The results showed that the factors that caused the decline in political participation of the community based on dimensions in Surbakti's theory (2010) were: (1) Political Awareness, with indicators of knowledge about the environment, society, and politics and participating in the political decision-making process, (2) Trust in the government, with indicators of one's assessment of the election organizing committee, (3) Social Status, with indicators of descent, education, and employment, (4) Economic Status, with income indicator, (5) Parents' Political Affiliation, with indicator of belonging to a political party, (6) Organizational Experience, with indicators of having been or being incorporated in an organization or group. **Conclusion:** The results of the study concluded that the factors that influenced the decline in community political participation in the 2020 Ponorogo Regency regional election were factors of public awareness and social status. Suggestions for this problem are to intensify socialization carried out by relevant agencies and update the system of conducting local elections using e-voting.

**Keywords:** *Community Political Participation, Regional Head Election*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu sistem penting dalam sebuah negara. Kesadaran politik masyarakat dalam hal memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada merupakan hal yang wajib karena menyangkut masa depan suatu daerah dalam lima tahun kedepan. Hasil rekapitulasi suara pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020 menunjukkan penurunan suara sebesar 1,56% dibandingkan pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020 dengan menggunakan teori Surbakti (2010) sehingga diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat berdasarkan dimensi pada teori Surbakti (2010) yaitu: (1) Kesadaran Politik, dengan indikator pengetahuan tentang lingkungan, masyarakat, dan politik serta ikut dalam proses pengambilan keputusan politik, (2) Kepercayaan pada pemerintah, dengan indikator penilaian seseorang terhadap panitia penyelenggara pilkada, (3) Status Sosial, dengan indikator keturunan, pendidikan, dan pekerjaan, (4) Status Ekonomi, dengan indikator pendapatan, (5) Afiliasi Politik Orang Tua, dengan indikator tergabung dalam partai politik, (6) Pengalaman Berorganisasi, dengan indikator pernah atau sedang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok. **Kesimpulan:** Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah faktor kesadaran masyarakat dan status sosial. Saran bagi permasalahan tersebut adalah menggiatkan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait dan memperbarui sistem pelaksanaan pilkada menggunakan *e-voting*.

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah

### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan maksud memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk dari penyelenggara negara. Hal ini berarti semua kegiatan administrasi negara wajib berdasarkan hukum yang sedang berlaku. Dalam berbangsa serta bernegara diperlukan sistem demokrasi yang berlandaskan hukum serta berkedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia yakni demokrasi mengemukakan bahwa sebuah pemerintahan dipimpin oleh, dari, dan untuk rakyat. Manifestasi dari sistem demokrasi yakni penyelenggaraan pemilu secara langsung.

Pemilihan umum merupakan sarana atau wadah manifestasi kedaulatan rakyat yang diwujudkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan suatu perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang telah di amandemen mengemukakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kebebasan bagi seluruh rakyat untuk memilih dan memutuskan pemimpin di masa yang akan datang tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.<sup>1</sup> Pelaksanaan demokrasi tidak hanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin di tingkat pemerintah pusat akan tetapi juga memilih pemimpin di tingkat daerah yakni provinsi, kabupaten dan kota. Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah salah satunya pemilihan kepala daerah atau yang disingkat pilkada. Pilkada merupakan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih oleh masyarakat dari daerah tersebut dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada tahun 2020 pemerintah menyelenggarakan pilkada secara serentak yang diikuti oleh 270 daerah, yang terdiri atas 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) atau sebanyak 53% dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.<sup>2</sup> Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pilkada secara serentak yang diikuti oleh 16 kabupaten dan 3 kota diantaranya Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Serta 3 kota yakni Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati adalah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dengan diikuti oleh 21 kecamatan dan 307 kelurahan. Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 pasangan calon. Nomor urut pertama ditempati oleh pasangan calon H. Sugiri Sancoko, S.E.,M.M – Lisdyarita, S.H yang diusung oleh koalisi 4 partai yakni Hanura, PAN, PDIP, serta PPP dan memenuhi persyaratan karena memiliki dukungan dari 9 kursi DPRD.<sup>3</sup> Nomor urut kedua ditempati oleh pasangan calon Drs. H. Ipong Muchlissoni – Bambang Tri Wahono, S.H., M.M yang diusung oleh koalisi 6 partai yakni Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, serta PKS dan memenuhi persyaratan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<sup>2</sup> Nick Milner and Edmund Burke, “Success in Mergers and Acquisitions ‘ Those Who Don’t Know History Are Destined to Repeat It .,” no. February (2010): 3–10.

<sup>3</sup> Helmi Supriyatno, “Diusung 4 Partai, Pasangan RiLis Deklarasi Maju Di Pilkada Ponorogo,” *Bhirawa Online*, last modified 2020, <https://www.harianbhirawa.co.id/diusung-4-partai-pasangan-rilis-deklarasi-maju-di-pilkada-ponorogo/>.

karena memiliki dukungan dari 36 kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo.<sup>4</sup> Berdasarkan rekapitulasi perhitungan hasil suara, diperoleh tingkat partisipasi Kecamatan Ponorogo sebesar 73,27%. Terhitung sebanyak 58.424 jumlah pemilih dan 42.808 jumlah pengguna hak pilih. Artinya sejumlah 15.616 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut tidak memenuhi target capaian persentase yang ditetapkan oleh KPU Nasional yakni sebanyak 77,5%. Selain itu dibandingkan dengan pilkada sebelumnya yakni pada tahun 2015, Kecamatan Ponorogo mengalami penurunan partisipasi masyarakat sebanyak 1,56%. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu berdasarkan data rekapitulasi perolehan hasil suara yang menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2020 yang terendah adalah Kecamatan Ponorogo. Selain itu terdapat penurunan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dibandingkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2015 sebesar 1,56%. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik meneliti fenomena terkait rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada Kabupaten Ponorogo dengan harapan agar peneliti dapat menemukan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat khususnya di Kecamatan Ponorogo dan menjadi evaluasi agar pada pelaksanaan pilkada periode berikutnya yaitu tahun 2024 terdapat peningkatan partisipasi politik masyarakat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan hasil suara, diperoleh tingkat partisipasi Kecamatan Ponorogo sebesar 73,27%. Terhitung sebanyak 58.424 jumlah pemilih dan 42.808 jumlah pengguna hak pilih. Artinya sejumlah 15.616 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut tidak memenuhi target capaian persentase yang ditetapkan oleh KPU Nasional yakni sebanyak 77,5%. Selain itu dibandingkan dengan pilkada sebelumnya yakni pada tahun 2015, Kecamatan Ponorogo mengalami penurunan partisipasi masyarakat sebanyak 1,56%.<sup>5</sup> Secara geografis Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut yang menarik penulis untuk melakukan penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Ponorogo.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Edi

---

<sup>4</sup> Abdul Jalil, "Ipong-Bambang Maju Pilkada Ponorogo Diusung 6 Parpol," *Madiunpos.Com*, last modified 2020, <https://www.madiunpos.com/ipong-bambang-maju-pilkada-ponorogo-diusung-6-parpol-1050836>.

<sup>5</sup> KPUD Kabupaten Ponorogo, "Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara" (2020).

Supriono (2017).<sup>6</sup> Peneliti tersebut melakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Mesuji tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Akan tetapi penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat khususnya Kabupaten Mesuji dalam pemilu dan memberikan solusinya. Ada juga penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Room Chaidir (2018)<sup>7</sup> dan Mifta Syarif (2022)<sup>8</sup> keduanya sama-sama mengkaji tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tetapi penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui peran KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, terdapat kajian lainnya yang membahas tentang pengaruh tingkat kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula yang dilakukan oleh Lila Nurbaiti (2019)<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dan memfokuskan penelitiannya hanya pada mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran politik pemilih pemula dan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Tajur pada pilkada Kota Tangerang tahun 2018.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian yang diangkat oleh penulis belum pernah ada yang meneliti. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Ponorogo pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Penulis juga lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yang menyebabkan penurunan pada pilkada tahun 2020. Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pilkada yang akan datang.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

---

<sup>6</sup> Edi Supriono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi Di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)," ed. Edi Supriono (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>7</sup> Muhammad Room Chaidir, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)," ed. Muhammad Room Chaidir (Universitas Brawijaya, 2018).

<sup>8</sup> Mifta Syarif, "Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023," ed. Mifta Syarif (2022).

<sup>9</sup> Lila Nurbaiti, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018," ed. Lila Nurbaiti (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data berupa jawaban-jawaban langsung yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, data pribadi bersifat elektronik, memo, serta rekaman resmi lainnya (Simangunsong, 2017)<sup>10</sup>. Tujuannya agar penulis dapat merumuskan secara ilmiah, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ponorogo
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ponorogo
4. Camat Kecamatan Ponorogo
5. Lurah di Kecamatan Ponorogo
6. Masyarakat Kecamatan Ponorogo

Penulis akan melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2013)<sup>11</sup>. Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum seluruh informasi yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat sehingga menyebabkan penurunan partisipasi politik masyarakat. Hasil rangkuman tersebut kemudian diseleksi (eliminasi) berdasarkan kriteria yang lebih penting. Hal-hal penting tersebut yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya akan penulis gambarkan secara jelas. Adapun teknik penyajian data akan dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar informan, dan sejenisnya yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan dengan cara menjadikan hasil kajian data sebagai kesimpulan akhir yang didukung oleh data-data dan menetapkan kesimpulan awal sebagai kesimpulan akhir dengan catatan jika tidak terdapat perubahan yang signifikan di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020

---

<sup>10</sup> Fernandes Simangunsong, *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

<sup>11</sup> Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke. (Bandung: CV Alfabeta, 2013).

berdasarkan teori Ramlan Surbakti tahun (2010)<sup>12</sup>. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo adalah karena kesadaran politik dengan indikator pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik dikarenakan masih ada masyarakat Kecamatan Ponorogo yang memberikan hak pilih berdasarkan iming-iming dari calon kepala daerah. Faktor kedua adalah status sosial dengan indikator pekerjaan dikarenakan terdapat masyarakat Kecamatan Ponorogo yang bekerja di luar negeri dan di luar Kabupaten Ponorogo memilih untuk tidak pulang kampung memberikan hak suaranya dikarenakan terkendala masalah waktu dan biaya.

### **3.1 Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Ponorogo Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

- a. Kesadaran politik dengan indikator pengetahuan tentang lingkungan, masyarakat dan politik masyarakat dapat dikatakan kurang dan mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat Kecamatan Ponorogo yang memberikan hak pilih berdasarkan iming-iming dari calon kepala daerah. Selanjutnya kesadaran politik dengan indikator ikut dalam proses pengambilan keputusan politik dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat yang berada di Kabupaten Ponorogo lebih memprioritaskan memberikan hak suara diatas kepentingan pribadinya.
- b. Kepercayaan kepada pemerintah dengan indikator penilaian seseorang terhadap panitia penyelenggara pilkada dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan panitia berhasil menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyelenggarakan pilkada secara aman dan damai tidak ada keributan akibat pelanggaran peraturan pilkada.
- c. Status sosial dengan indikator pendidikan dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Ponorogo memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas sehingga mayoritas masyarakatnya dapat memahami penyelenggaraan pilkada. Berikutnya status sosial dengan indikator keturunan dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dikarenakan masyarakat Kecamatan Ponorogo tetap memperhatikan perkembangan politik walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Ponorogo tidak memiliki latar belakang keluarga yang bergelut di bidang politik. Selanjutnya status sosial dengan indikator pekerjaan dapat dikatakan kurang dan mempengaruhi penurunan partisipasi politik dikarenakan terdapat masyarakat Kecamatan Ponorogo yang bekerja di luar negeri dan di

---

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ed. Adinto Fajar Djoni Herfan (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010).

luar Kabupaten Ponorogo memilih untuk tidak pulang kampung memberikan hak suaranya.

- d. Status ekonomi dengan indikator pendapatan dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi politik dikarenakan walaupun mayoritas tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Ponorogo tergolong sedang namun tidak mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suaranya.
- e. Afiliasi politik orang tua dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi penurunan partisipasi politik dikarenakan partai politik yang berada di Kecamatan Ponorogo beserta masyarakat yang tergabung di dalamnya tidak hanya berfokus pada visi misinya, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitarnya.
- f. Pengalaman berorganisasi dapat dikatakan baik dan tidak mempengaruhi masyarakat dikarenakan terdapat bermacam-macam organisasi masyarakat di Kecamatan Ponorogo dan banyak masyarakat yang tergabung di dalamnya. Hal tersebut menandakan interaksi sosial yang baik sehingga penyebaran informasi termasuk informasi terkait pilkada dapat disampaikan melalui ormas.

### **3.2 Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Ponorogo pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020**

- a. Kesadaran Politik dengan indikator pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik dikarenakan masih ada masyarakat Kecamatan Ponorogo yang memberikan hak pilih berdasarkan iming-iming dari calon kepala daerah.
- b. Status Sosial dengan indikator pekerjaan dikarenakan terdapat masyarakat Kecamatan Ponorogo yang bekerja di luar negeri dan di luar Kabupaten Ponorogo memilih untuk tidak pulang kampung memberikan hak suaranya dikarenakan terkendala masalah waktu dan biaya.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo pada pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Pertama*, penurunan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo yang disebabkan oleh kesadaran Politik dengan indikator pengetahuan tentang lingkungan masyarakat dan politik dikarenakan masih ada masyarakat Kecamatan Ponorogo yang memberikan hak pilih berdasarkan iming-iming dari calon kepala daerah. *Kedua*, status sosial dengan indikator pekerjaan yang disebabkan karena terdapat masyarakat Kecamatan Ponorogo yang bekerja di luar negeri dan di luar Kabupaten Ponorogo memilih untuk tidak pulang kampung memberikan hak suaranya dikarenakan terkendala masalah waktu dan biaya. Fakta tersebut tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi seluruh pihak yang terlibat baik itu panitia penyelenggara dan masyarakat, mengingat Negara Indonesia merupakan

negara demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang penyelenggarannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sehingga partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan guna memilih pemimpin berdasarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan baik dalam hal sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pendidikan politik khususnya pelaksanaan pilkada agar kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah lebih meningkat. Selain itu diperlukan pembaruan dalam hal sistem pemungutan suara dengan cara *e-voting* sehingga pelaksanaan pilkada dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu diharapkan kepada calon kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat dengan visi misinya bukan dengan iming-iming yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memperoleh edukasi terkait dengan pendidikan politik. Saran tersebut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dan menjadi perbaikan untuk pelaksanaan pilkada pada periode yang akan datang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah faktor kesadaran masyarakat dan status sosial. Saran bagi permasalahan tersebut adalah menggiatkan sosialisasi yang dilakukan instansi terkait dan memperbarui sistem pelaksanaan pilkada menggunakan *e-voting*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ponorogo pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, Panitia Pemilihan Kecamatan Ponorogo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ponorogo, Camat Kecamatan Ponorogo dan seluruh jajarannya, seluruh Lurah di Kecamatan Ponorogo, serta masyarakat Kecamatan Ponorogo dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Fernandes Simangunsong. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Supriyatno, Helmi. “Diusung 4 Partai, Pasangan RiLis Deklarasi Maju Di Pilkada Ponorogo.” *Bhirawa Online*. Last modified 2020.  
<https://www.harianbhirawa.co.id/diusung-4-partai-pasangan-rilis-deklarasi-maju-di-pilkada-ponorogo/>.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Edited by Adinto Fajar Djoni Herfan. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010.

### B. Artikel Ilmiah

- Chaidir, Muhammad Room. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan).” Edited by Muhammad Room Chaidir. Universitas Brawijaya, 2018.
- Lila Nurbaiti. “Pengaruh Tingkat Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kelurahan Tajur Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018.” Edited by Lila Nurbaiti. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Supriono, Edi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi Di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji).” Edited by Edi Supriono. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mifta Syarif. “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.” Edited by Mifta Syarif. 2022.

### C. Jurnal

- Milner, Nick, and Edmund Burke. “Success in Mergers and Acquisitions ‘ Those Who Don’t Know History Are Destined to Repeat It ., ” no. February (2010): 3–10.

### D. Sumber Lain

- Ponorogo, KPUD Kabupaten. “Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara” (2020).
- “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan->

ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Jalil, Abdul. "Ipong-Bambang Maju Pilkada Ponorogo Diusung 6 Parpol."  
*Madiunpos.Com*. Last modified 2020. <https://www.madiunpos.com/ipong-bambang-maju-pilkada-ponorogo-diusung-6-parpol-1050836>.

